

BAB II

PERKEMBANGAN XENOFOBIA DI PRANCIS

2.1 Masuknya Xenofobia ke Eropa

Perpindahan imigran sudah terjadi di Eropa sebelum perang dunia ke 2 terjadi. Kemudian pada akhir abad ke 19, Eropa sangat membutuhkan pekerja imigran terutama saat masyarakat Eropa kelas menengah tidak ingin melakukan pekerjaan buruh lagi sehingga menerima imigran buruh adalah pilihan pemerintah saat itu. Negara-negara maju Eropa saat itu yang sedang ingin meningkatkan industri negara sangat mengandalkan imigran dalam prosesnya. Awalnya, arus imigran yang terjadi hanya di dalam lingkup negara-negara Eropa saja seperti Portugis, Spanyol, Italia dan Yunani yang memilih Prancis, Inggris atau Jerman sebagai negara tujuan demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun, pada pertengahan tahun 1960-an, imigran juga turut berdatangan dari Afrika Utara, Timur Tengah dan Afrika. Selain memberikan keuntungan kepada imigran yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik, negara penerima imigran juga membutuhkan pekerja imigran dengan upah rendah sehingga dapat meningkatkan ekonomi negara (Messina, 2007, p. 21).

Lambat laun, kebutuhan pekerja imigran bagi negara-negara Eropa semakin menurun terutama akibat adanya resesi. Beberapa negara Eropa yang tergolong masyarakatnya menengah ke bawah menganggap perpindahan imigran ini sebagai invasi yang mengancam gaya hidup dan budaya masyarakat Eropa asli. Bahkan anggapan ini disusul dengan tindakan kekerasan yang timbul dalam masyarakat anti-imigran. Kekerasan yang terjadi pada masa tersebut merupakan awal dari terbentuknya sikap xenofobia di kalangan masyarakat Eropa. Selain itu, persepsi

masyarakat yang selalu menghubungkan imigran dengan kriminal juga semakin meningkatkan sikap xenofobia terutama karena banyak kasus kriminal yang melibatkan imigran (Ember, Ember, & Skoggard, 2005, p. 182). Toleransi yang menurun dan pernyataan xenofobia kala itu merupakan manifestasi dari rasa takut terhadap orang asing terutama imigran.

2.2 Xenofobia di Prancis

Setelah masuk ke Eropa, sentimen xenofobia menyebar luas bahkan hingga ke Prancis. Namun, pemikiran xenofobia ini sudah berkembang di Prancis sejak lama tetapi belum sebagai xenofobia. Pada tahun 1880 ketika Prancis sedang melakukan revolusi pasca depresi ekonomi dan krisis nasionalisme, masyarakat kala itu terbagi menjadi beberapa golongan pendapat mengenai kategori kewarganegaraan Prancis. Adanya perdebatan mengenai status kewarganegaraan imigran juga menjadi masalah negara kala itu. Belum lagi masalah asimilasi, masyarakat Prancis kala itu dikatakan sedikit memiliki sifat *self-understanding* karena kebanyakan mengakui sebagai warganegara Prancis dari segi politik dan sosial dibandingkan dari segi etnis. Sehingga hal tersebut menunjukkan lemahnya pemahaman etnisitas Prancis yang ada di masyarakat. Langkah asimilasi dijadikan sebagai solusi agar perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap masyarakat dapat bersatu dan membantu pemulihan negara melalui revolusi. Usaha ini menimbulkan pemahaman baru di kalangan masyarakat mengenai nasionalisme.

Nasionalisme kala itu disebut dengan '*the ambiguities of nationalism*' (nasionalisme yang ambigu). Nasionalisme yang terbentuk pun masih abu-abu dan melahirkan dua sentimen gabungan baru yang dikenal dengan nasionalisme asimilasionis dan nasionalisme eksklusionis. Kedua sentimen baru ini sama-sama

memiliki fokus objek terhadap imigran. Masyarakat **nasionalisme asimilasionis** bersedia untuk memberikan kewarganegaraan bagi para imigran dan menerima budaya baru dari etnis-etnis baru yang datang dibawa oleh para imigran. **Nasionalisme eksklusionis** ini meliputi adanya keinginan dalam melakukan proses asimilasi tanpa melibatkan imigran karena adanya perbedaan etnis. Dari masyarakat nasionalis yang berpikiran eksklusionis tersebut akhirnya berkembang menjadi “counternationalism” (Brubaker, 1992, pp. 112-5).

Pemikiran counternationalism inilah yang menjadi cikal bakal xenofobia. Namun, sentimen xenofobia baru jelas berkembang ketika pasca perang dunia ke 2 berakhir. Sama halnya dengan negara-negara Eropa pada umumnya, Prancis menerima pekerja imigran merupakan rencana dalam meningkatkan infrastruktur nasional dan rehabilitasi industri. Dengan menerima imigran, ekonomi Prancis akan meningkat dengan terbentuknya industri yang kian membaik. Imigran yang menetap di Prancis berasal dari Algeria, Italia, Spanyol dan Portugis (McDonald, 1969, p. 1). Arus imigran kala itu begitu meningkat dibandingkan sebelumnya. Peristiwa ini bahkan telah disebut sebagai gerakan perpindahan imigran. Para imigran dipindahkan secara permanen yang awalnya ditempatkan di bidang pertanian dan pertambangan kemudian dalam konstruksi dan industri berat. Sedangkan imigran jangka pendek bekerja hanya di bidang pertanian.

Peningkatan imigran bukan hanya memberikan dampak kenaikan ekonomi melainkan juga aksi kriminal yang melibatkan mereka. Masyarakat mulai resah dengan hal tersebut ditambah imigran kerap kali disalahkan oleh masyarakat sebagai sebab dari kemunduran negara dan dituduh sebagai perenggut kekayaan

alam. Peristiwa ini membawa xenofobia muncul di kalangan masyarakat (Roemer, Lee, Yi, & Straeten, 2007, p. 238).

2.3 Dinamika Xenofobia di Prancis (2012 – 2018)

Kata xenofobia di kalangan masyarakat pada era Presiden Francois Hollande dan Emmanuel Macron sudah tidak asing lagi. Pasalnya, Xenofobia memang telah sering menjadi perbincangan dari masa presiden sebelum Hollande yaitu Presiden Nicolas Sarkozy. Sarkozy pernah memberikan pernyataan jelas bahwa imigran dan minoritas hanya merupakan penghambat bagi perkembangan negara. Bukan hanya itu, Sarkozy juga menganggap integrasi sosial negara juga akan sulit dicapai jika melibatkan para imigran. Pernyataan tersebut tentu memberi pengaruh terhadap peningkatan xenofobia di kalangan masyarakat. Peningkatan tersebut terus terjadi hingga Presiden Hollande dan Presiden Emmanuel Macron menjabat (Samuel H. , 2012).

Xenofobia bahkan telah dideklarasikan sebagai Word of the Year tahun 2016 lalu sehingga isu ini menjadi isu yang layak untuk diperbincangkan (Dictionary.com, 2016). Sebelumnya memang tingkat xenofobia di kalangan masyarakat Prancis mengalami kenaikan dan penurunan. Pada awal kepemimpinan Hollande tahun 2012, Hollande disambut dengan tindakan xenofobia masyarakat melalui Twitter. *Hashtag* rasis yang menjadi tren di Prancis seperti #AGoodJew dilakukan oleh para pelajar disertai dengan tautan foto kamp konsentrasi Yahudi masa Perang Dunia ke dua dulu. Tidak jarang para pelajar melanjutkan tren tersebut dengan kata-kata yang menjatuhkan seperti “*A good Jew can reinflate your tire with his nose*” hingga “*A good Jew is a Jew dead on the tiles*”. Kata-kata ini tersebar di dunia maya dan menjatuhkan harga diri Yahudi. Pemerintah berhasil menghapus

segala aktivitas *hashtag* ini setelah melakukan beberapa sidang dengan pihak Twitter dan pelaku yang melakukan cuitan di Twitter (Greenhouse, 2013).

Selain itu, Christiane Taubira seorang politikus Prancis tidak luput dari serangan verbal karena berkulit hitam. Serangan verbal ini dilakukan oleh seorang anak kecil yang memanggilnya dengan sebutan *guenon* (monyet). Sikap tersebut dilakukan karena mereka menganggap Taubira sebagai simbol perkawinan sesama jenis kala itu. Banyak masyarakat yang melakukan protes akan disahkannya perkawinan tersebut bahkan beberapa anak-anak juga turut ikut serta dalam protes yang dilakukan masyarakat. Peristiwa ini merupakan peristiwa umum yang sering terjadi di Prancis bahkan orang tua dari anak-anak tersebut tidak melarang dan justru bangga akan wujud “protes” yang dilakukan oleh anak-anak mereka (Poirier, 2013). Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa sedari awal tahun 2012, sikap xenofobia sudah melekat pada beberapa masyarakat.

Selanjutnya, tingkat xenofobia masyarakat mengalami kenaikan dan penurunan hingga tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 tingkat xenofobia mengalami peningkatan yang cukup drastis. Peningkatan ini diakibatkan oleh peristiwa arus imigrasi yang terjadi pada tahun 2015 lalu. Peristiwa ini merupakan arus imigran terbesar yang masuk ke Eropa hingga dapat menyebabkan krisis imigran (Chan, 2015). Bukan hanya krisis imigran, krisis identitas juga menjadi topik yang marak diperbincangkan pada media berita mainstream akibat dari arus ini (O'Brien, 2016).

Krisis imigran ini membuat negara-negara di Eropa kesulitan dalam mengatasinya sehingga menimbulkan perpecahan pendapat dalam relokasi imigran

antar negara. Dari data statistik EU pada tahun 2017, negara-negara di Eropa menerima sekitar 4,7 juta imigran dari arus imigrasi tahun 2015 sedangkan 2,8 juta jiwa memilih mencabut kependudukan sebagai negara anggota EU. Imigran yang berdatangan berasal dari beberapa daerah terutama negara yang sedang mengalami konflik. Penduduk Suriah (38%) merupakan penyumbang terbesar imigran diikuti oleh Afganistan (12%), Irak, Kosovo, Albania, Pakistan, Eritrea, Nigeria, Iran dan Ukraina. EU memilih untuk merelokasi para imigran ke seluruh negara-negara Eropa dengan sistem kuota (BBC, 2016). Dari seluruh jumlah imigran, Prancis merupakan negara ketiga setelah Jerman dan Inggris yang paling banyak menampung para imigran yaitu sebanyak 363,9 ribu jiwa (European Commission, 2017).

Perpindahan ini tentu banyak menimbulkan pro dan kontra. Pendapat pro tidak lain karena alasan kemanusiaan, sedangkan pendapat kontra memiliki berbagai alasan. Banyak masyarakat Prancis yang kontra menganggap bahwa imigran hanya akan menjadi beban negara dan ancaman bagi hak masyarakat asli. Sikap kontra yang ditunjukkan di sini merupakan sikap xenofobia masyarakat belum lagi ditambah serangan-serangan yang terjadi sebelum krisis imigran yang menjadi bayangan ketakutan bagi masyarakat. Seperti serangan Charlie Hebdo yang terjadi pada 7 Januari 2015 dengan menewaskan 17 orang (CNN, 2017). Selain itu, Serangan Truck Di Nice yang merenggut 86 korban jiwa dan melukai ratusan orang (Human Rights Watch, 2017). Paris Attack yang terjadi pada November 2015 merenggut sebanyak 130 korban jiwa dan 413 orang luka-luka (CNN, 2018). Kedua serangan ini dilakukan oleh gerakan esktrimis yang mengaku sebagai gerakan jihad Islam. Pengakuan ini tentu menambah geram sekaligus

prasangka buruk masyarakat terhadap Muslim di Prancis. Bukan hanya Muslim, minoritas lainnyapun turut menjadi sasaran generalisasi sikap xenofobia masyarakat (Gee, 2017).

2.3.1 Xenofobia Terhadap Imigran

Para imigran yang datang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak dibanding negara asal mereka justru dikatakan membawa masalah baru. Masyarakat asli menganggap bahwa imigran hanya datang untuk merenggut hak masyarakat terutama sebagian besar imigran berpindah dengan tujuan ekonomi. Selain itu, masyarakat tidak percaya sepenuhnya kepada imigran yang berasal dari negara asal yang terdapat perang, operasi diktator dan ekstremis agama (Kingsley, 2015).

Ketakutan-ketakutan tersebut menjadikan sikap xenofobia semakin mengental di kalangan masyarakat. Menurut survei Ipsos yang dilakukan secara global 2015 lalu, Prancis merupakan negara yang paling banyak memberi respon negatif terhadap perpindahan ini. Bahkan, sebanyak 57% masyarakat Prancis mengatakan bahwa Prancis sudah menampung terlalu banyak imigran. Sebanyak 6 dari 10 orang mengatakan imigran hanya akan memberikan dampak negatif terhadap negara terutama dalam segi ekonomi karena mayoritas imigran datang dengan kemiskinan. Selain itu, sebanyak 54% (rata-rata global 46%) masyarakat mengatakan imigran telah mengubah Prancis ke arah yang mereka tidak inginkan. Lalu 63% survei Ipsos menyatakan bahwa imigran tidak akan mampu untuk berintegrasi dengan budaya Prancis. Belum lagi angka pengangguran di Prancis pada tahun 2017 sebanyak 9% dari populasi yang terbilang tinggi membuat masyarakat ketakutan akan haknya direnggut oleh imigran (The Local Fr, 2016).

2.3.2 Xenofobia terhadap Minoritas

Sikap xenofobia masyarakat Perancis bukan hanya diperuntukkan untuk imigran saja melainkan juga minoritas yang ada di Prancis. Minoritas di Prancis terdiri dari masyarakat Muslim, Yahudi, Roma hingga Tionghoa. Minoritas di Prancis sudah mendapatkan diskriminasi dimulai dari tingkat hukum legal, verbal bahkan aksi nyata. Dari Konstitusi Prancis sendiri tidak terdapat adanya tulisan ‘minoritas’ yang menunjukkan eksistensi.

Artikel 1 tahun 1958:

“France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs. It shall be organised on a decentralised basis.

Statutes shall promote equal access by women and men to elective offices and posts as well as to position of professional and social responsibility”

Maksud dari artikel tersebut adalah Prancis akan selalu menjadi negara Republik yang tak terpisahkan, sekuler, demokratis dan sosial. Prancis harus menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, tanpa membedakan asal, ras atau agama. Prancis harus menghormati segala keyakinan. Harus diorganisir secara desentralisasi. Akses setara juga harus diberikan kepada perempuan dan laki-laki dalam tanggung jawab posisi profesional dan sosial.

Konstitusi ini merupakan konstitusi model Republik yang menuntut masyarakat untuk menjadi “Prancis” dan budaya hingga Bahasa yang digunakan harus merupakan identitas Prancis. Model ini sama sekali tidak dibentuk untuk terciptanya integrasi dari kelompok-kelompok yang ada di Prancis. Melainkan, hanya akan memberikan kesulitan bagi para minoritas dalam keadaan sosial Prancis.

Selain itu, pada artikel 3:

“National sovereignty shall vest in the people, who shall exercise it through their representatives and by means of referendum.

No section of the people nor any individual may arrogate to itself, or to himself, the exercise thereof.

Suffrage may be direct or indirect as provided for by the Constitution. It shall always be universal, equal and secret.

All French citizens of either sex who have reached their majority and are in possession of their civil and political rights may vote as provided for by statute”.

Artikel 66:

“No one shall be arbitrarily detained.

The Judicial Authority, guardian of the freedom of the individual, shall ensure compliance with this principle in the conditions laid down by statute.” . (Assemblée Nationale, n.d.)

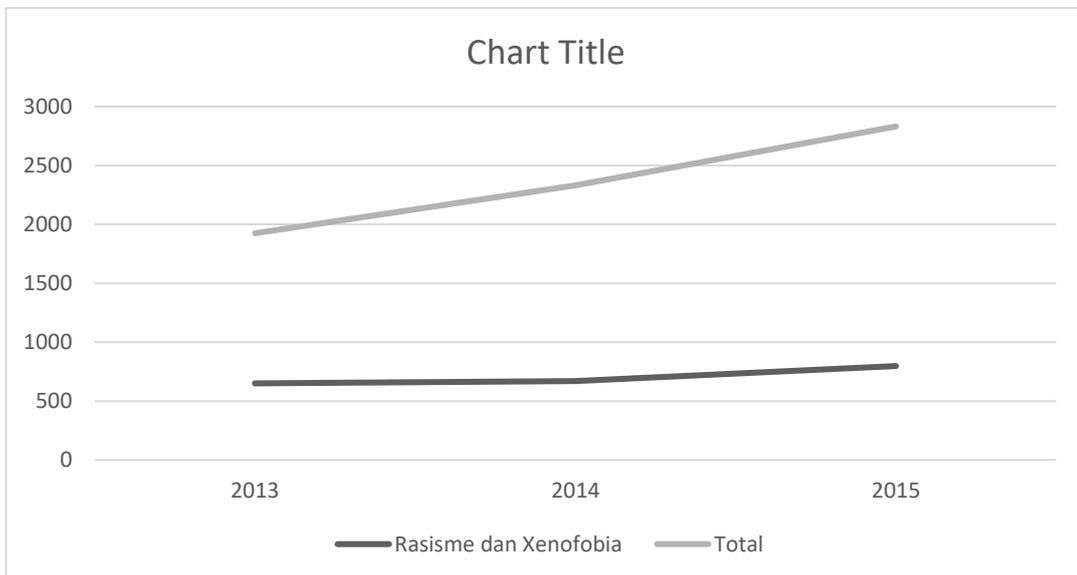
Kedua artikel tersebut hanya menyebut masyarakat menggunakan kata individu bukan komunitas atau kelompok. Sebagai hasilnya, otoritas Prancis telah menolak segala bentuk tindakan kepada kelompok etnis, agama atau bahasa. Hal tersebut secara tidak langsung membentuk diskriminasi sistematis bagi para minoritas (Gilbert, 2016).

Hukum Prancis juga melarang adanya pengambilan data apapun berdasarkan ras, etnis atau agama. Seperti contohnya tidak ada data status sosial ekonomi dari suatu kelompok yang berdasarkan ras, etnis agama atau lainnya bahkan konsensus penduduk sama sekali tidak menyinggung ras atau etnisitas (Oppenheimer, 2008, p. 745).

Gagasan mengenai kata ‘minoritas’ tidak ada secara legal di Prancis. Padahal faktanya, jumlah penduduk Yahudi sebanyak 500.000 jiwa atau sekitar 1% dari jumlah populasi dan menurut PEW Research Survei jumlah populasi Muslim diperkirakan sebanyak 4,7 juta jiwa atau sekitar 7,5% dari populasi yang mana

angka tersebut cukup besar. Pemerintah sendiri bahkan menyebut generasi kedua atau ketiga masyarakat kewarganegaraan Prancis yang masih memiliki latar belakang Muslim dengan sebutan “people from Muslim background” (Hackett, 2017).

Selain imigran tentu minoritas selalu menjadi sasaran masyarakat dalam melampiasikan sikap xenofobianya. Berikut perubahan aksi xenofobia masyarakat tahun 1992 – 2015:



Grafik 1. Grafik peningkatan tindakan xenofobia masyarakat asli hingga tahun 2015 (CNCDH, 2015).¹

Menurut menteri dalam negeri Prancis, aksi atau ancaman anti-Muslim dan anti-semitis mengalami peningkatan 22,4% pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2014, aksi rasis tersebut berjumlah 1.662 aksi dan pada tahun 2015 sebanyak

¹ Grafik dengan kategori total menunjukkan gabungan serangan dari rasisme, xenofobia, anti-semitisme, anti-Muslim. Tren dari grafik ini menyimpulkan sikap xenofobia yang terus meningkat.

2.304 aksi yang menjadi jumlah terbanyak data di atas. Ada tiga poin penting data kelanjutan dari grafik di atas:

1. Kekerasan anti-Semitis menurun hingga 5,1% dari total 808 aksi kriminal dibandingkan 851 pada tahun 2014
2. Kekerasan anti-Muslim meningkat lebih dari tiga kali lipat (bertambah 223%) dengan angka mencapai 429 aksi kriminal dibandingkan 133 di tahun 2014
3. Kejahatan kriminal lainnya yang tergolong kekerasan rasisme anti-Semitis ataupun anti-Muslim meningkat sebanyak 17,5% hingga berjumlah 797 kekerasan.

Tahun 2015 merupakan tahun tersulit bagi masyarakat Muslim terutama tahun 2014 setelah serangan Charlie Hebdo dan Paris Attack. Bukan hanya menggeneralisasi Muslim sebagai pelaku teroris, masyarakat menyalahkan pemerintah dan juga pemerintah negara-negara Arab untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut (Birnbaum M. , 2016). Masyarakat semakin takut terhadap eksistensi Muslim di Prancis. Dari poling yang dilakukan oleh Lembaga survei Prancis ditemukan sebanyak 50% orang menilai Islam adalah ancaman bagi keamanan nasional. Lalu ada 67% masyarakat takut akan ekstremis dapat menyamar sebagai imigran. Kemudian 63% orang yang menganggap bahwa budaya Islam tidak cocok dengan nilai Prancis dan budaya Islam akan menenggelamkan budaya Eropa (France24, 2014)

Dari data Grafik 1 menunjukkan terdapat 429 ancaman dan serangan anti-Muslim. Angka ini meningkat 223% dibandingkan tahun lalu dan 808 ancaman dan

serangan antisemitismes yang menunjukkan penurunan sebanyak 5% dari tahun sebelumnya. Akibat serangan jihadis menjadikan Muslim secara umum target akan sikap xenofobia yang meningkat terutama setelah foto anak kecil bernama Aylan yang menjadi korban beredar menjadikan sejumlah Walikota terutama dari Roanne dan Belfort menyatakan lebih memprioritaskan pengungsi Kristen dibandingkan yang lain (CNCDH, 2015). Lembaga survei Sputnik di Prancis melakukan survei kepada masyarakat tahun 2016 lalu dengan pertanyaan “Apakah imigran dari Afrika dan Timur Tengah menjadi alasan peningkatan kejahatan?”. Sebanyak 8% mengatakan tidak tau, 28% tidak dan 64% menjawab iya (Sputnik, 2016).

Pemerintah sendiri sudah mulai melarang hal-hal yang dianggap mencolok untuk digunakan oleh kaum Muslim. *Head scarf* atau kerudung yang merupakan identitas utama Muslimah telah dilarang penggunaannya di lingkungan sekolah pada tahun 2004. Dilanjutkan pelarangan menggunakan niqab atau cadar di tempat umum pada tahun 2011. Tak hanya itu, pada musim panas 30 kota melarang Muslim untuk menggunakan burkini atau pakaian renang tertutup untuk Muslimah pada tahun 2016 (Weaver, 2018). Ini merupakan pelanggaran bagi hak dasar Muslim.

Masyarakat yang menganggap diri mereka superior cenderung membenarkan diri dalam mengekspresikan pendapat misalnya kasus kartun Danish yang menggambar tokoh Nabi Muhammad pada tahun 2005 lalu. Mereka membenarkan tindakan mereka sebagai kebebasan berekspresi namun menganggap Muslim sebagai teroris hanya dengan menggunakan pakaian yang berbeda dari mereka. pandangan masyarakat telah jauh menyimpang ketika merendahkan simbol agama lain sebagai kebebasan berekspresi (Szabo, 2015). Muslim tetap menjadi minoritas yang paling sulit diterima di Prancis.

Selain Muslim, Yahudi merupakan minoritas kedua yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat Prancis. Dari Grafik 1 terlihat Walau anti-semitis mengalami penurunan, 808 serangan dalam 1 tahun ini terhitung merupakan 40% dari segala aksi rasis pada tahun tersebut. Padahal populasi Yahudi di Prancis hanya sebanyak 1% dari total jumlah penduduk (Glasser, 2016). Masyarakat memiliki prasangka tersendiri terhadap Yahudi. Sebanyak 20% masyarakat menganggap Yahudi terlalu banyak memiliki kekuasaan pada ranah politik dan 20% masyarakat menilai bahwa Yahudi lebih kaya dibandingkan rata-rata masyarakat Prancis. Kepala hubungan eksternal Yahudi Inggris mengatakan bahwa 1 dari 10 orang masyarakat Prancis menganggap bahwa sudah terlalu banyak Yahudi di Prancis yang notabene hanya 1% dari populasi (Vulliamy, 2016). Bahkan semenjak tahun 2004, Yahudi dilarang untuk menggunakan *skullcaps* sejenis topi keagamaan yang menjadi identitas mereka.

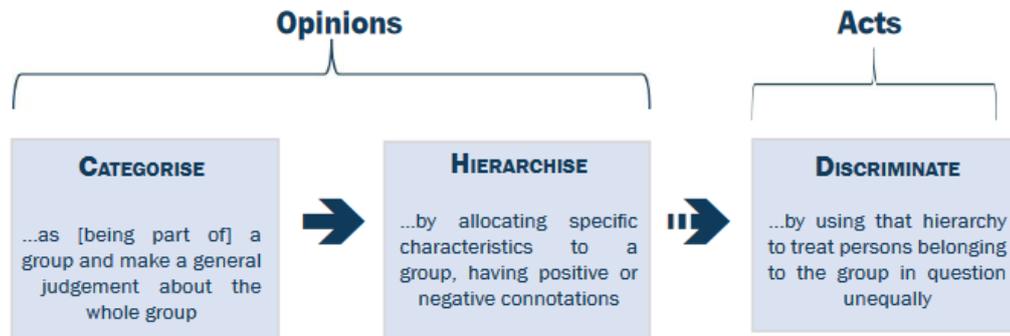
Lalu ada komunitas Roma di Prancis yang merupakan campur aduk dari beberapa etnis dengan status kependudukan yang berbeda-beda (kewarganegaraan Prancis, kewarganegaraan luar negeri, tidak memiliki kewarganegaraan, dll) yang menyusahakan keadaan mereka selanjutnya. Orang-orang Romany asli merupakan imigran yang awalnya berasal dari negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur sedangkan yang lainnya adalah wisatawan yang masuk ke Prancis dalam keadaan administratif tertentu. Kebanyakan dari mereka adalah warga negara Prancis yang jauh dari globalisasi. Populasi mereka diperkirakan sebanyak 15.000 hingga 20.000 atau setara dengan 0,03% jumlah populasi keseluruhan. Karena jumlah mereka yang begitu sedikit, menjadikan komunitas Roma tidak begitu dipentingkan oleh

masyarakat lainnya. Dengan pemukiman kumuh sebagai tempat menetap mereka, populasi komunitas Roma dikatakan stabil (Kearney, 2017).

Masyarakat Prancis melihat orang-orang Roma sebagai orang-orang yang homogen dan nomaden, menyalahgunakan tunjangan kesejahteraan sosial dan tidak ingin berintegrasi. Selain itu, mereka dikenal sebagai orang-orang yang jorok, miskin dan suka mengemis. 57% masyarakat Prancis memiliki anggapan buruk terhadap kelompok Roma pada tahun 2015, tetapi angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014 sebanyak 77%. Komunitas Roma sering mendapatkan serangan diskriminasi seperti kebencian verbal dan juga aksi vandalisme dengan tulisan *Sales Juifs et Roms* yang artinya “orang Yahudi dan Romani kotor” di pagar sekolah Anne Frank (Safdar, 2017).

Suatu hal baru muncul di pemerintahan mengenai komunitas masyarakat keturunan Tionghoa yang berjumlah setengah juta di Prancis. Setelah terjadinya pembunuhan seorang Tionghoa yang bekerja pada industri garmen terbunuh pada tahun Agustus 2016 lalu di daerah Aubervilliers. Kasus pembunuhan ini menjadi pemicu protes yang dilakukan oleh komunitas Tionghoa dengan masa ribuan orang. Protes ini justru menjadi boomerang bagi masyarakat Tionghoa pasalnya, akibat dari protes tersebut banyak kejadian pencurian dan penganiayaan yang menargetkan pedagang Tionghoa di daerah Paris dan sekitarnya. Aksi kriminal ini diketahui dilakukan oleh masyarakat yang memiliki pandangan bahwa orang-orang Tionghoa mendapatkan upah kerja dengan jumlah yang tinggi dan bisnis mereka selalu menggunakan uang kas sehingga menjadi sasaran yang menguntungkan. Pemerintah lokal menyebut peristiwa ini sebagai kampanye dari tindakan xenophobia yang baru muncul kepada Tionghoa (Louison, 2016).

Dilihat dari serangan-serangan xenophobia yang telah terjadi, prasangka merupakan sebab dari awalnya terbentuk diskriminasi.

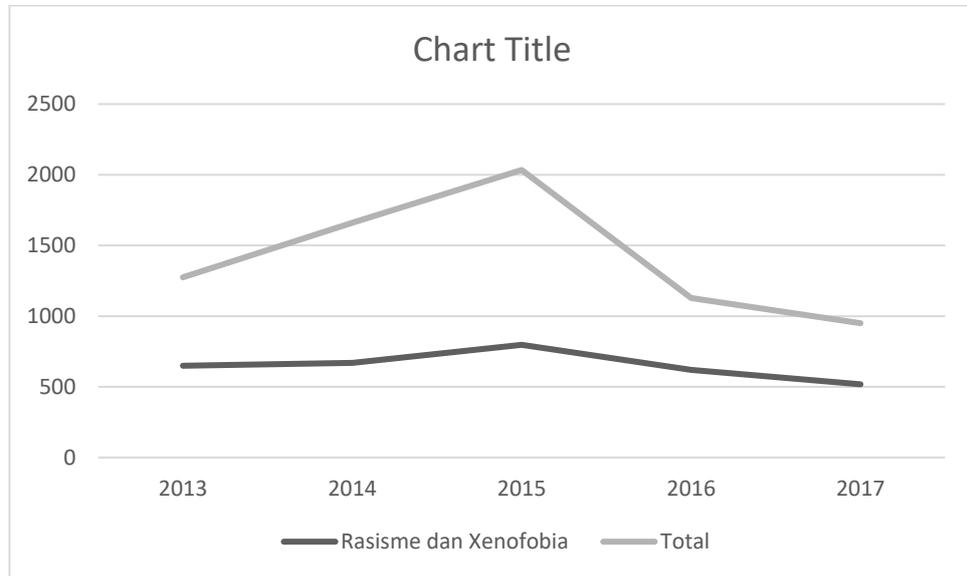


Gambar 1. Proses terbentuknya sikap xenophobia masyarakat asli (CNCDH, 2015).

Masyarakat cenderung mengkategorikan orang lain yang berbeda dengan mereka dalam berbagai kelompok. Lalu masyarakat kemudian memberikan karakteristik masing-masing pada setiap kelompok yang kemudian menjadi alasan setiap aksi yang dilakukannya.

Pada laporan CNCDH tahun 2017 lalu menyatakan adanya penurunan di beberapa aksi xenophobia masyarakat. Polisi mengatakan aksi xenophobia pada tahun 2016 menurun sebanyak 44,7% yaitu hanya 1125 kasus dibandingkan dengan tahun 2015. Kasus antisemitis berjumlah 335 kejadian, anti-Muslim berjumlah 182 kejadian dan rasisme sebanyak 608 kejadian. Selain itu, ada hampir 750 keluhan kata-kata ofensif (provokasi, hinaan, fitnah) yang terdaftar dengan alasan “karena ras, tempat asal, etnis atau agama” setiap bulannya. Total keseluruhan pada tahun 2017, ada sekitar 8.700 laporan tercatat pada tahun 2017 yang 59% diantaranya merupakan kejahatan ofensif dan 41%nya merupakan level-4 dan level-5 kata-kata

ofensif singkat. Keluhan-keluhan tersebut biasanya dilakukan di tempat-tempat umum dan lebih sering terjadi di wilayah urban (CNCDH, 2015).



Grafik 2. Grafik peningkatan tindakan xenofobia masyarakat asli hingga tahun 2017 (CNCDH, 2017)²

Dari Grafik 2 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata aksi xenofobia cenderung menurun pada tahun 2017. Sebesar 16% penurunan terjadi pada tahun ini dengan 950 aksi pada tahun 2017 dan 1.128 aksi pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, tingkat xenofobia pada tahun 2017 cenderung rendah namun hal ini tetap saja harus menjadi perhatian masyarakat umum karena serendah apapun xenofobia tetap saja merupakan sikap yang merugikan. Oleh karena itu, pemerintah Francois Hollande dan Emmanuel Macron tentunya harus

² Grafik dengan kategori total menunjukkan gabungan serangan dari rasisme, xenofobia, anti-semitisme, anti-Muslim. Tren dari grafik ini menyimpulkan sikap xenofobia yang terus meningkat dari tahun 2013-2015. Penurunan terjadi pada tahun 2016-2017.

mengupayakan berbagai cara agar sikap xenofobia di masyarakat Prancis terus mengalami penurunan.